



Analysis of nationalism in Kurikulum Merdeka

Gupi Rohman Nurmansyah

Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

gupim@gmail.com

ABSTRACT

Nationalism is related to problems related to many people in a nation and country, such as corruption, radicalism, discrimination, and racism in culture. The concept of nationalism, according to experts from different countries, is almost entirely the same, as differences will not make a problem. Especially in Indonesia, the concept of nationalism has a critical position, even entering the realm of education. The Kurikulum Merdeka emphasizes Profil Pelajar Pancasila, who follows all the precepts in their design on the competence of graduates, but whether the five precepts are already in the mapping of the Kurikulum Merdeka needs to be carried out in-depth analysis. This research uses a qualitative approach to the literature study, which analyzes the Kurikulum Merdeka on Profil Pelajar Pancasila. The result is that the third precept, namely "Unity of Indonesia", which has the concept of nationalism, has not yet fully emerged comprehensively. So, it is necessary to map the concept of nationalism related to the material to the strategy, especially on the idea of the third precept, namely "Unity of Indonesia" in all disciplines of study for students.

ARTICLE INFO

Article History:

Received: 16 Oct 2022

Revised: 28 Jan 2023

Accepted: 1 Feb 2023

Available online: 10 Feb 2023

Publish: 24 Feb 2023

Keyword:

Curriculum; Kurikulum Merdeka; nationalism; Profil Pelajar Pancasila

Open access

Inovasi Kurikulum is a peer-reviewed open-access journal

ABSTRAK

Nasionalisme dianggap berhubungan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan banyak orang pada sebuah bangsa maupun negara seperti korupsi, radikalisme, diskriminasi, rasisme hingga budaya. Konsep nasionalisme menurut para ahli dan dari berbagai negara hampir sepenuhnya sama, adapun perbedaan tidak akan membuat sebuah permasalahan. Khususnya Indonesia konsep nasionalisme memiliki kedudukan yang sangat penting, bahkan masuk dalam ranah pendidikan. Kurikulum merdeka yang menekankan profil pelajar Pancasila yang mengadopsi semua sila dalam desainnya pada kompetensi lulusan, namun apakah ke lima sila sudah ada dalam pemetaan kurikulum merdeka perlu dilakukan analisis yang mendalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi pustaka, yang menganalisis kurikulum merdeka pada profil pelajar Pancasila. Hasilnya bahwa, sila ke-tiga yaitu "Persatuan Indonesia" yang terdapat konsep nasionalisme di dalamnya belum sepenuhnya muncul secara komprehensif. Sehingga perlu adanya pemetaan konsep nasionalisme terkait materi hingga strateginya khususnya pada konsep sila ke-tiga yaitu "Persatuan Indonesia" pada semua disiplin kajian untuk siswa.

Kata Kunci: Kurikulum; Kurikulum Merdeka; nasionalisme; Profil Pelajar Pancasila

How to cite (APA 7)

Nurmansyah, G. R. (2023). Analysis of nationalism in Kurikulum Merdeka. *Inovasi Kurikulum*, 20(1), 105-116.

Peer review

This article has been peer-reviewed through the journal's standard double-blind peer review, where both the reviewers and authors are anonymised during review.

Copyright



2023, Gupi Rohman Nurmansyah. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>, which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. *Corresponding author: gupim@gmail.com

INTRODUCTION

Bangsa Indonesia memiliki perjuangan panjang mempertahankan tanah airnya dari penjajah yang berusaha menguasai ataupun mendayagunakan dengan berat sebelah terkait sumber daya alam maupun tenaga masyarakat Nusantara. Tentu saja berdasarkan sejarah tersebut kerugian besar dirasakan oleh masyarakat pribumi, tetapi kerugian terhadap masyarakat pribumi tidak hanya pada masa lalu saja, bahkan di zaman sudah merdeka ini banyak tikus berdasi yang sangat merugikan negara Indonesia. Semua tikus berdasi tersebut merupakan warga negara Indonesia yang terpelajar, tentu saja timbul pertanyaan bahwa apakah mereka masih memiliki jiwa nasionalisme terhadap bangsa ini? Apakah ada yang salah atau kurang dengan pendidikan yang dimiliki oleh para tikus berdasi tersebut? Ada persepsi menyatakan bahwa dengan banyaknya fenomena korupsi merupakan indikator merosotnya dan dapat menggerus rasa nasionalisme dari pelaku tersebut maupun sebuah bangsa (As, 2016; Santosa, 2012). Xi Jinping Presiden China menggalakkan rasa nasionalisme untuk menuntaskan kasus-kasus yang krusial seperti korupsi, pasalnya dahulu kala China memang menang perang tetapi kalah dalam politik karena banyaknya pejabat yang korupsi (Wang, 2017; Xiaolin, 2017). Tidak membicarakan pro ataupun kontranya, strategi semacam itu nyatanya terbukti efektif untuk melibas kasus korupsi di negara China. Memang benar bahwa dengan menanamkan rasa nasionalisme dalam masyarakat, mereka akan terpengaruh dan berpikir untuk korupsi serta memiliki visi pembangunan nasionalnya (Hanifah & Yudianto, 2019; Hollyer & Wantchekon, 2012; Walton, 2021). Adanya jiwa nasionalisme dalam diri seseorang akan mengalahkan rasa ingin korupsi, atau dapat ditafsirkan bahwa dalam diri seseorang tersebut memiliki rem dan pengendalian diri dari jiwa nasionalismenya terkait perilaku yang dapat merugikan negara.

Negara Indonesia sendiri memberi syarat bagi para calon pegawai negeri sipil agar memiliki jiwa nasionalisme, karena mereka sedikit banyak akan bergelut dengan keuangan dan administrasi yang rawan berpeluang dalam mengambil keuntungan untuk dirinya (Budiman, 2020). Alasan mengapa korupsi disandingkan dengan nasionalisme adalah jika korupsi dibiarkan maka akan menjadi sesuatu yang wajar, dan jika sesuatu yang wajar itu terus ada maka akan membudaya. Perilaku korupsi yang membudaya akan seperti jamur panu yang muncul dalam kulit luar sebuah bangsa dan menjadi ciri khas yang buruk. Dikarenakan nasionalisme terbentuk melalui kebenaran politik dari budaya bersama yang ada dalam persepsi masyarakat (Irfani, 2016). Tentu saja dengan banyaknya korupsi dalam sebuah negara kata-kata kemakmuran maupun kesejahteraan rakyatnya patut dipertanyakan. Pasalnya dengan tingginya nasionalisme masyarakat dalam sebuah negara, maka bangsa akan aman, damai, dan makmur (Widiyono, 2019).

Namun, pada kenyataannya permasalahan yang berkaitan dengan nasionalisme tidak hanya korupsi, tetapi kejadian seperti terorisme, rasisme, perang hingga mudahnya generasi muda terhadap budayanya. Kasus lain seperti terorisme maupun radikalisme memang paling kuat masuk melalui kaum muda dengan cara mendoktrin dengan visi keagamaan. Akan tetapi, meningkatnya kecintaan seseorang terhadap sesuatu dalam hal ini pada negara yaitu seperti benteng dari pengaruh yang salah (Saliman & Agustian, 2017). Pemaknaan terhadap terorisme memberikan narasi terhadap agama dan juga nasionalisme negara yang menjadi pemicunya dengan menganggap hina musuh, sehingga nasionalisme jenis ini dikategorikan cukup ekstrim (Arayunedya & Armandha, 2020; López Romo & Fernández Soldevilla, 2018). Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa memang nasionalisme memiliki kepentingan terhadap sebuah negara, tetapi dari sisi lain nasionalisme juga menjadi benteng ancaman yang dapat merenggut keamanan dan ketentraman orang banyak, maka di sinilah seharusnya nasionalisme bekerja. Terkait dengan aksi paham radikal terorisme ini sebenarnya dapat dicegah melalui mekanisme sosial masyarakat (Riyanta, 2022). Masyarakat tentunya memiliki pemahaman yang baik mengenai agama maupun nasionalisme, meskipun sesungguhnya terorisme ini berkaitan dengan pemahaman ideologi dan doktrin ganda, tetapi tidak menutup kemungkinan dalam aksinya melibatkan

tindakan kekerasan, walaupun tidak sedang kondisi perang (Dexter, 2012). Sehingga dalam pemaknaan ini nasionalisme memiliki identitas yang bervariasi, tetapi tergambar dengan jelas bahwa apabila menyangkut kepentingan orang banyak dalam sebuah negara maka di situlah peran nasionalisme.

Gambaran jelas dalam kondisi Papua saat ini, bahwa isu diskriminasi, rasisme dan diskriminasi melekat pada masyarakat tersebut sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa nasionalisme Papua masih hidup, padahal yang menyatukan Indonesia adalah satu rasa nasionalisme yang sama (Soetjipto & Yunazwardi, 2021). Walaupun sebenarnya di Indonesia sudah ada undang-undang terhadap rasisme dan diskriminasi, tetapi masih ada kasus yang terjadi, bahkan kerap menjadi pemicu perpecahan antar suku di Indonesia, sehingga perlu adanya upaya edukasi yang komprehensif (Adrian et al, 2021). Tidak dapat dipungkiri bahwa diskriminasi dan rasisme terhadap suatu kelompok, ras, atau suku adalah awal mula peperangan dimulai di seluruh dunia, sehingga ideologi nasionalisme digunakan sebagai senjata untuk menggerakkan orang-orang agar berperang. Semua mengklaim kebenaran pada kelompoknya dengan alasan membela tanah air berkedok nasionalisme. Hitler yang mempunyai visi untuk memurnikan ras Arya dengan membantai habis kaum Yahudi telah menyulut api perang hingga berdampak ke seluruh dunia. Saat ini, peran yang harus dilakukan adalah menjaga perdamaian dan memutus rantai prasangka diskriminasi terhadap suatu kaum dalam proses belajar sosial (Kuncoro, 2007; Purwanto, 2020). Bahkan tidak hanya itu, dengan adanya visi nasionalisme yang kuat akan mengerdilkan paham kelompok dan mengurangi angka perang saudara (Hinnebusch, 2020).

Pasca perang dingin negara China mulai menggalakkan nasionalisme melalui pendidikan untuk mendongkrak ideologi bahkan untuk menaikkan segala aspek di negara tersebut (Zhao, 1998). Sebagai hasilnya saat ini negara China mampu bersaing secara teknologi maupun ekonomi bahkan di segala aspek mereka mampu membombardirnya dengan kualitas yang tidak main-main. Terlepas dari kapitalisme maupun hal-hal lain yang menjadi peradaban, bahwa strategi pendidikan untuk menguatkan nasionalisme memang sangat tepat untuk kepentingan sebuah negara, namun kesejahteraan dan ketentraman juga tidak boleh dilupakan. Dikarenakan membicarakan nasionalisme tidak hanya tentang masalah diskriminasi, korupsi, rasisme, terorisme ataupun perang, tetapi lebih dari itu seperti rasa cinta terhadap tanah air, budaya yang digambarkan menjadi sebuah kebiasaan perilaku masyarakat seperti gotong royong maupun hal lainnya (Lestari, 2018).

Nasionalisme diartikan menjadi bermacam-macam oleh orang-orang, salah satunya adalah semangat persatuan. Zaman dulu nasionalisme merupakan sesuatu yang sakti dan ampuh untuk membangkitkan semangat perjuangan mempertahankan tanah air (Kusumawardani & Faturochman, 2004). Namun, untuk Indonesia saat ini, kata-kata nasionalisme perlu dibangkitkan kembali kesaktiannya untuk menumbuhkan jiwa semangat, tetapi bukan untuk berperang dengan adu kekuatan fisik maupun senjata. Dikatakan bahwa kata-kata nasionalisme di era maju saat ini untuk membangkitkan semangat, untuk pembangunan dari berbagai bidang seperti ekonomi, industri, melestarikan budaya, dan pertahanan kedaulatan (Vega 2021). Hal itu sudah bertahun-tahun lamanya, tetapi pendapatnya masih sangat relevan hingga saat ini meninjau kondisi negara Indonesia dikatakan negara yang sedang merangkak menuju garis atas kesejahteraan dan sebagai negara maju. Memang benar dalam perkembangan sejarah nasionalisme di Indonesia mengalami perubahan, sehingga saat ini nasionalisme sangat relevan untuk membangkitkan warga dalam membangun ekonomi dan ekonomi kreatif (Handayani, 2019). Pandangan Handayani tersebut ada karena analisis perkembangan nasionalisme dari masa pergerakan, orde lama, orde baru dan reformasi yang mengalami adaptasi sesuai dengan zaman yang berlaku. Pendapat tersebut memang sangat relevan dengan kondisi saat ini, bahwa dikatakan dengan adanya globalisasi berdampak pada tergerusnya identitas kaum muda yang meniru budaya negara lain dan melupakan identitas bangsanya sendiri (Iswara & Ginting, 2022). Identitas sebuah warga negara perlu dibangun serta merupakan sesuatu yang dapat dilihat oleh negara lain sebagai peluang kerja sama geopolitik maupun ekonomi maupun daya tarik pariwisata dikarenakan pengaruh *branding* masyarakat di suatu negara (Browning & de Oliveira,

2017; Isaacs & Polese, 2015; Pawlusz & Polese, 2017). Pada posisi ini sebuah negara perlu melibatkan maupun meningkatkan pemahaman nasionalisme pada anak muda, tetapi perlu adanya keamanan dalam benak mereka agar potensi yang mereka miliki juga berkembang, dengan catatan negara juga harus dapat menjamin keamanan konflik seperti ketidaksetaraan gender (Botterill *et al.*, 2016; Rao, 1999;).

Selain itu pendidikan nasionalisme malah menjadi wadah multikulturalisme maupun budaya lokal yang ada, sehingga intelektual dan warisan budaya dapat dihargai dengan baik (Wang & Wang, 2018). Oleh karena itu penting bagi kelangsungan sebuah bangsa untuk membangun identitas warganya ataupun sebagai wadah sakti yang dapat digunakan untuk menyatukan visi setiap masyarakat. Wawasan nasionalisme juga perlu diberikan dalam bidang pendidikan, pasalnya banyak tergerusnya identitas anak muda terhadap jati diri sebagai warga negara Indonesia maupun mematahkan anggapan nasionalisme yang negatif. Saat ini banyak anak muda sedang mengalami penurunan rasa nasionalisme akibat dampak dari berbagai macam hal seperti globalisasi, dan masih banyak lagi, sehingga diperlukan nasionalisme melalui pendidikan yang lebih tajam lagi (Amalia & Najicha, 2022; Suryana & Dewi, 2021; Syahira Azima *et al.*, 2021; Widiastuti, 2022). Oleh karena itu, dengan adanya pergantian kurikulum di Indonesia dengan penekanan enam karakter profil pelajar Pancasila ini apakah sudah benar-benar menginjeksikan semua sila ke dalam kurikulum ini. Dikarenakan kurikulum itu ada memang untuk memenuhi kebutuhan dan bukan hanya sekedar pawai istilah. Dari keresahan tersebut, artikel ini mencoba untuk menganalisis dan mengkaji bagaimana Kurikulum Merdeka menjadi upaya bagi pemerintah untuk meningkatkan rasa nasionalisme khususnya bagi para pelajar, melalui Profil Pelajar Pancasila.

LITERATURE REVIEW

Konsep Nasionalisme

Nasionalisme merupakan suatu pemahaman yang membuat dan menjaga kedaulatan suatu negara dengan melahirkan satu konsep identitas bersama bagi sekelompok manusia yang mana dapat mengedepankan dirinya sebagai bagian dari paham negara atau gerakan (bukan negara) yang populer, baik dari pendapat warga negara, etnis, budaya, keagamaan, serta ideologi (Syarif, 2019). Analisa Grigoryan & Ponizovski (2018) bahwa istilah nasionalisme merupakan kumpulan dari gagasan struktural kebangsaan yang membentuk kerangka identitas, sehingga masyarakat yang tidak menganggap diri mereka sebagai bagian dari bangsa dikatakan belum modern (perspektif bangsa) dan hal itu terletak pada kesetiaan dan solidaritas masyarakat. Awal mulanya konsep nasionalisme memang muncul di Barat dan Eropa, tetapi saat ini terdapat pertentangan antara konsep politik dan persamaan wilayah yang menjadi pembedanya, tetapi secara garis lurus nasionalisme merupakan identitas dari persamaan masyarakat dalam sebuah wilayah meskipun terdapat perdebatan tentang bahasa yang digunakan secara sosial (Schneider, 2019).

Nasionalisme merupakan ciri khas cinta tanah air, pemahaman bernegara yang mendorong dalam pembentukan kekuasaan serta persetujuan dalam menyimpai negara berlandaskan identitas yang sudah disepakati juga berperan sebagai langkah awal untuk melaksanakan latihan sosial dan moneter (Nursamsi & Jumardi, 2022). Konsep nasionalisme dapat saja berbeda antara satu bangsa dengan bangsa yang lain, ataupun dapat juga menjadi bingkai untuk mewadahi perkumpulan sebuah bangsa dalam sebuah negara, oleh karena itu satu konsep yang lebih tepat yaitu bahwa nasionalisme merupakan kesamaan visi yang jadi pedoman bertindak pada masyarakat dalam sebuah bangsa dan negara. Konsep nasionalisme secara singkat merupakan visi bersama dalam ikatan kebangsaan demi kepentingan bangsa, bangsa dalam hal ini dapat dikatakan adalah warga negara.

Latief dalam buku "*Nasionalisme*" mengutarakan bahwa Nasionalisme Pancasila merupakan pemahaman rasa cinta bangsa Indonesia terhadap tanah air yang didasarkan nilai-nilai Pancasila. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa rasa kebanggaan merupakan salah satu perwujudan dari jiwa nasionalisme

masyarakat, salah satunya bangga terhadap budaya yang dimiliki ataupun segala hal yang dihasilkan dari masyarakat tersebut. Oleh karena itu, saat ini banyak pendapat yang mengatakan bahwa mencintai produk lokal juga bagian dari nasionalisme. Pada pembahasan ini budaya dalam identitas sebuah masyarakat juga bagian penting, pasalnya budaya merupakan bukti kemajuan peradaban pada sebuah bangsa, sehingga merosotnya kecintaan terhadap budaya juga berpengaruh terhadap indeks nasionalismenya (Kholidah, 2019).

Kurikulum Merdeka

Kurikulum bisa dikatakan sebagai ruh dari pendidikan yang harus selalu dievaluasi secara inovatif, dinamis, juga berkala sehingga sesuai dengan perkembangan zaman dan IPTEK serta kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat (Barlian *et al.*, 2022). Kurikulum merdeka mulai dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang bersifat fleksibel, serta memiliki fokus pada materi esensial juga pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik (Barlian *et al.*, 2022). Kurikulum ini memiliki tujuan untuk memperbaiki sumber daya manusia dan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia (Vhalery, *et al.*, 2022). Kurikulum ini mulai diterapkan secara bertahap dan menjadi kurikulum pilihan untuk tahun ajaran (TA) 2022/2023 serta merupakan lanjutan arah pengembangan dari Kurikulum 2013. Selain itu, kurikulum ini juga bertujuan untuk mengembangkan *softskill* dan *technical skills* sehingga mempersiapkan lulusan masa depan yang berkepribadian serta berprestasi (Alawi *et al.*, 2022).

Kurikulum menempati posisi yang sangat penting dalam pendidikan, di manapun tempatnya. Ada yang mengatakan bahwa terdapat pendidikan tanpa kurikulum, tetapi hal itu sepenuhnya tidak benar. Bahwa kurikulum bukan hanya program tertulis, akan tetapi kurikulum juga ada yang tidak tertulis yang disebut dengan *hidden curriculum*. Bahkan dalam lingkup kecil sekalipun kurikulum akan tetap ada, misalnya seseorang yang sedang merencanakan sesuatu pastinya dirinya sendiri akan memprogram dan menentukan arah dan tujuannya. Berdasarkan alasan seperti itu kurikulum menempati posisi yang penting dalam pendidikan bahkan hampir semua aspek kehidupan. Kurikulum tidak hanya terbatas pada tujuan atau isinya saja, tetapi sampai hal yang sangat detail seperti cara mengajar, buku ajar bahkan tentang manajemen lembaga juga diperhitungkan (Ylimaki & Uljens, 2017).

METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan menyesuaikan dengan fokus kajian. Penelitian pustaka ini memiliki keunggulan untuk menjaga seorang dengan keahlian tertentu tetap pada bidangnya (Metress, 1982). Kegiatan yang dilakukan dengan cara membaca, mengeksplorasi dan kajian. Kajian yang dilakukan dari berbagai macam sumber seperti buku, artikel, jurnal dan dokumen kurikulum merdeka pada Profil Pelajar Pancasila. Ali (2014) dalam "Memahami riset perilaku dan sosial" menyebutkan bahwa data lunak atau deskriptif yang dihasilkan dari penelitian ini diperoleh dari kajian dokumen sebagai sumbernya.

RESULTS AND DISCUSSION

Konsep nasionalisme berawal dari kata *Nation* yang merupakan bangsa di mana sekelompok manusia yang memiliki kesadaran untuk bersatu dalam ikatan sejarah, budaya dan kesamaan turunan, tetapi dalam arti lain juga ditinjau dari segi objektif tempat wilayah, bahasa bahkan agama ataupun penunjukan pada negara seperti United Nations ataupun kumpulan lebih dari satu negara seperti United Kingdom. Kellas dalam bukunya yang berjudul "*The politics of nationalism and ethnicity*" menjelaskan bahwa nasionalisme merupakan ideologi yang dibangun atas kesadaran masyarakat yang memberikan haluan sikap dan

program aksinya. Cox dalam "*Nationalism Themes theories and controversies*" menyebutkan, walaupun banyak unsur tersembunyi dalam konsep pemahaman nasionalisme dengan bangsa maupun persepsi modern dan pra-modern berbeda, tetapi pemersatuan perbedaan pandangan tujuan yang berbeda sebuah bangsa untuk menjadi satu visi dalam sebuah negara merupakan konsep nasionalisme. Ulasan Cox memberikan pemahaman yang jelas bahwa nasionalisme tidak akan terlepas dari sebuah kepentingan politik, bahkan di era globalisasi ini tidak akan terlepas dari ekonomi negara. Pada abad 19-20 nasionalisme memiliki arti sempit dan agresif yang mengakibatkan penyimpangan dari ide asli konsep ini hingga menyebabkan permusuhan dan penghancuran, pasalnya cita-cita asli dari nasionalisme adalah persatuan (Hans, 1955). Bahkan Anand & Lall (2022) mengungkapkan bahwa melesetnya ide nasionalisme akan dibebankan kepada para guru-guru di sekolah untuk memberikan pembenaran dari konsep nasionalisme yang sesungguhnya tanpa menggiring terhadap paham ekstrim kiri dan kanan. Analisis pembentukan konsep nasionalisme yaitu struktural bersifat individual dan sipil, kemudian kultural yaitu identitas seperti budaya dan psikologi terkait dengan perasaan, perilaku maupun kepercayaan (Greenfeld & Chirot, 1994).

Soekarno dalam bukunya yang berjudul "*Nasionalisme, Islamisme & Marxisme*" menyebutkan bahwa nasionalisme dalam pandangan Indonesia ditinjau dari sejarahnya memang lebih condong kepada kata sakti, sebab pada masa itu nasionalisme pada rakyat hendaknya menjadi satu riwayat, satu golongan dan satu iktikad yang menipiskan ras maupun etnis yang akan membongkar persatuan. Sedangkan Abdullah dalam buku "*Nasionalisme & Sejarahnya*" mengungkapkan bahwa pemahaman nasionalisme di Indonesia merupakan hasrat gerakan politik karena dipicu oleh ketertindasan, sehingga muncul satu gerakan yang sama dengan dasar pesakitan. Pengaruh barat terhadap Indonesia maupun intervensinya diketahui membangkitkan semangat nasionalisme karena pengaruh kepemilikan sumber daya alam, sehingga juga akan menentukan arah politiknya (Winanti & Diprose, 2020). Dalam perkembangan konsep nasionalisme sendiri dapat dilihat pada negara-negara yang baru merdeka, mereka akan mengadopsi konsep itu ke dalam sebuah implementasi pendidikan untuk diteruskan pada generasi mudanya (Kim & Jung, 2019). Urusan nasionalisme dengan pendidikan ini tentunya pada penanaman ideologi, dikarenakan generasi tua tentunya akan digantikan oleh generasi muda. Sehingga untuk menjaga semangat visi bangsa salah satu jalan alternatifnya melalui pendidikan.

Konsep nasionalisme di Indonesia dapat dikatakan sangat kental dengan unsur politik, pasalnya dalam perkembangan sejarahnya wilayah nusantara dan klaim kolonial menjadi perebutan yang panjang. Sehingga konsep nasionalisme Indonesia menginterpretasikan rantai persatuan budaya rakyat dalam ikatan satu bangsa sebagai pendorong ketahanan satu visi (Sulistiyono, 2018). Adanya persatuan warga Indonesia dalam sejarahnya membuat konsep nasionalisme sebagai penyatuan untuk menentukan masa depan dan nasib bangsa (Aini & Efendi, 2019). Konsep yang dikatakan oleh Aini & Efendi sangat relevan dengan kondisi Indonesia pada waktu itu karena adanya pemerintahan kolonial, tetapi konsep tersebut juga masih sangat relevan hingga sekarang. Pasalnya saat ini Indonesia mengejar kemerdekaan dan saat ini Indonesia juga mengejar kesejahteraan masyarakatnya khususnya dari segi ekonomi. Memang nasionalisme sangat erat dengan pertahanan dan militer, namun pendorong semua itu adalah ekonomi, sehingga konsep ekonomi dalam nasionalisme juga akan menentukan orientasi bangsa tersebut (Baltz, 2021; Baughn, 1996). Padahal Baughn sudah mengatakan hal seperti itu sudah sangat lama, tetapi nyatanya hal itu terbukti hingga saat ini dan masih sangat relevan. Memang setelah berakhirnya perang dunia II persaingan ekonomi antar negara menjadi pusat perhatian dengan berbagai macam caranya, sehingga konflik internasional sedikit banyak dipengaruhi ekonomi (Levi-Faur, 1997). Pernyataan Faur memang seperti prediksi, tetapi kejadian konflik antar negara salah satu pemicunya adalah ekonomi, seperti perebutan minyak, tambang ataupun sumber daya lainnya. Sehingga konsep nasionalisme tidak akan cukup hanya membicarakan cinta tanah air saja, tetapi harus memiliki persatuan dalam segi visi untuk kepentingan bangsa ke depannya dari berbagai macam ruang lingkungannya.

Negara Republik Indonesia memegang teguh ideologi Pancasila sebagai pedoman warga negara untuk bertindak dan berperilaku bahkan bervisi. Sehingga pengamalan Pancasila akan dapat dilihat dalam berbagai macam bentuk kehidupan orang Indonesia. Dalam Pancasila tercermin dengan jelas konsep nasionalisme dalam sila ke-empat yaitu "Persatuan Indonesia", yang digambarkan sebagai pohon beringin. Pohon beringin sebagai simbol sila ke-tiga memuat makna bahwa banyak akar sulur, tetapi dari satu pohon yang sama (Nasution, 2019). Meninjau kembali dalam sumpah pemuda semua bersatu dalam tumpah darah, bangsa dan bahasa. Dikatakan oleh Kellas bahwa konsep nasionalisme adalah bersatunya berbagai macam aspek seperti sejarah, budaya, keturunan dan bahasa. Sehingga penjelasan Anderson dan Kellas sangat sesuai, bahwa Nasionalisme merupakan sebuah konsep untuk bersatu dengan berbagai macam kesamaan, bahkan Anderson dalam "Nasionalisme Indonesia Kini dan Masa Depan" mengatakan nasionalisme merupakan kata sakti dalam sejarah Indonesia merebut kemerdekaan. Dapat ditafsirkan bahwa, nasionalisme dalam benak orang Indonesia merupakan sesuatu yang mirip benda keramat atau semacam pusaka yang tidak terlihat namun dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia. Sehingga konsep nasionalisme untuk orang Indonesia dengan menarik garis lurus Sila ke-tiga adalah persatuan. Maka dapat dikatakan bahwa nasionalisme adalah persatuan, tetapi hal tersebut tidak dapat dimaknai hanya sebatas itu saja. Bahwa konsep persatuan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan banyak landasan dan alasan yang kuat dan jelas.

Nasionalisme dalam Kurikulum Merdeka

Dalam tradisi didaktik, kurikulum juga bidang disiplin mempelajari praktiknya, dalam arti apapun yang berkaitan di lapangan perlu diperhitungkan (Doel, 1987; Deng, 2018). Sedangkan di awal telah di bahas bahwa nasionalisme penting muncul dalam pendidikan Indonesia, walaupun sebenarnya sudah di wadahi dalam Pendidikan Kewarganegaraan atau Pendidikan Pancasila. Namun, paradigma awal muncul bahwa Kurikulum merdeka mengadopsi dari ke lima sila. Namun, dalam Profil Pelajar Pancasila tidak memuat sila ke-tiga yaitu persatuan, namun memuat cinta tanah air dalam "beriman, bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia". Kurikulum merdeka yang menekankan lulusan hendaknya berperilaku sesuai dengan prinsip Pancasila, tetapi seperti di awal bahwa tema persatuan belum muncul secara komprehensif. Pentingnya Nasionalisme di muat dalam pendidikan Indonesia termasuk sila ketiga yang bukan hanya pemahaman saja, tetapi juga pengamalannya (Aswasulasikin *et al.*, 2020; Luthfillah & Rachman, 2022; Sianturi & Dewi, 2021). Asumsi awal ini menyatakan bahwa nasionalisme pada sila ke-tiga yaitu persatuan belum sepenuhnya terintegrasi dalam Profil Pelajar Pancasila yang klaim awal menyatakan bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila. Asumsi ini bukan hanya opini semata, tetapi secara kasat mata juga sudah terlihat jelas bahwa nasionalisme dalam Profil Pelajar Pancasila hanya memuat cinta tanah air. Meskipun rasionalisasi cinta tanah air nantinya juga dapat berubah dalam konteks persatuan. Hal ini bukan perkara lain waktu menunggu perubahan atau dapat dicarikan gagasan lain, pasalnya dari dulu sudah banyak kritikan yang muncul terkait konteks nasionalisme dalam pendidikan di Indonesia.

Tidak ada diskusi tegas pada buku teks sejarah Indonesia tentang perlawanan atas penjajahan dan hanya menjelaskan kedudukan negara lain (Surajaya, 2018). Penelitian Surajaya tersebut sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu pada kurikulum yang berlaku saat itu, namun kurikulum yang berlaku saat ini khususnya pada isinya apakah juga masih sama. Tergambar dengan jelas bahwa pada masa lalu ditegaskan banyak masuk dan kritikan. Hingga saat ini berdasarkan banyak kritikan yang masuk masih perlu dipertanyakan terkait perbaikan maupun revisinya. Pasalnya diperlukan adanya materi dan bahan ajar tentang nasionalisme yang mudah dicerna oleh siswa (Ismawati, 2018). Pendapat tersebut tentu diperkuat dengan dasar yang jelas, dikarenakan konsep nasionalisme sendiri bermacam-macam bahkan dapat berubah sesuai kondisi sebuah bangsa.

Analisis muatan nasionalisme ini khususnya pengamalan sila ke-tiga dalam kurikulum merdeka. Pertama dilihat dari pengakuan kurikulum merdeka bahwa Profil Pelajar Pancasila adalah hendaknya lulusan nanti akan memiliki perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Jika perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila merupakan kompetensi, artinya sebuah keahlian yang dapat diukur ataupun diamati. Ditinjau dari pedoman “Kajian Pengembangan Profil Pelajar Pancasila” menjelaskan banyak petunjuk teknis termasuk dimensi yang pertama yaitu beriman, bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhalk mulia dari fase PAUD hingga fase E usia 16-18 tahun SMA sederajat yang paling tinggi adalah menganalisis dan merefleksikan. Tetapi sama sekali belum muncul bagaimana cara bersatu atau apa itu persatuan dan bagaimana bentuknya. Tetapi dalam buku kajian akademik kurikulum untuk pemulihan belajar memuat “persatuan” berdasarkan Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang diubah dengan PP No.4 Tahun 2022. Dalam kajian akademik tersebut menjelaskan rasional persatuan harus muncul dalam kurikulum merdeka, akan tetapi terdapat ketidak sinkronan antara konsep dan mekanismenya. Lebih kuat lagi berdasarkan analisis Buku Saku tanya jawab kurikulum merdeka sama sekali tidak ada bahasan konsep kurikulum merdeka, buku itu hanya mengulas mekanisme implementasi. Padahal dalam teori kurikulum tidak hanya menekankan pada teknis maupun mekanis, tetapi perbaikan pola pikir pengembang dan pelaksana harus sama-sama satu frekuensi, agar implementasinya juga sesuai dan tidak lari ke segala arah.

Teori kurikulum merupakan landasan bagi praktik atau pelaksanaan kurikulum, teori dapat juga sebagai konsep kurikulum sebagai bahan maupun pedoman implementasinya yang berkaitan dengan didaktiknya (Deng, 2018; Linné, 2015; Moberg, 2018). Sehingga dalam bahasan ini sebenarnya kurikulum merdeka dikatakan sebagai konsep sudah memenuhi prasyarat pengembangan kurikulum, tetapi belum kuat pada mekanismenya. Dalam pembahasan ini dapat ditafsirkan bahwa, pengamalan sila ke-tiga dari Pancasila masih belum komprehensif, artinya Profil Pelajar Pancasila sebagai kompetensi masih belum terdapat ukuran yang jelas. Logikanya tanpa ada petunjuk praktis dalam kurikulum yang kuat maka berisiko membiarkan siswa berlawanan arah dalam memahami sebuah materi ajar (Engel, 1968; Melograno, 1978). Engel mengatakan hal tersebut sudah berpuluh-puluh tahun lamanya, bahwa petunjuk bukan berarti memaksa siswa bertindak dengan kaku, tetapi kejelasan petunjuk sebagai pembatas dari hal-hal yang tidak terduga muncul ketika siswa mempelajari sesuatu. Sedangkan Melograno mendukungnya dengan menyatakan bahwa petunjuk praktis akan memudahkan guru untuk menggali potensi yang dimiliki siswanya. Sehingga analisis pada kurikulum merdeka pada Profil Pelajar Pancasila ini dapat dikatakan hanya setengah benar dan setengah kurang tepat.

CONCLUSION

Nasionalisme dalam pandangan Indonesia merupakan darah daging setiap warga negara dalam berperilaku dan berpikir. Nasionalisme di Indonesia dengan sengaja dan direncanakan melalui perhitungan yang matang ini diwujudkan salah satunya melalui pendidikan. Kurikulum Indonesia yang sering berganti tentu saja menyesuaikan dengan kondisi yang ada, tetapi dalam perjalanannya tentu mendapatkan tantangan. Profil Pelajar Pancasila secara tegas merefleksikan Pancasila ke dalam capaian lulusannya, tetapi pengamalan sila ke-tiga dalam hal ini adalah persatuan masih belum komprehensif, artinya tentang strategi dan materi-materi pendukung masih belum sepenuhnya terintegrasi dalam berbagai disiplin kajian yang nantinya akan dipelajari oleh siswa.

AUTHOR'S NOTE

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan terkait publikasi artikel ini. Penulis menegaskan bahwa data dan isi artikel bebas dari plagiarisme.

REFERENCES

- Adrian, D. M., Wantu, F. M., & Tome, A. H. (2021). Diskriminasi rasial dan etnis dalam perspektif hukum Internasional. *Jurnal Legalitas*, 14(01), 1-17.
- Aini, D. N., & Efendi, A. (2019). Penanaman nilai-nilai nasionalisme Pancasila dalam pendidikan Vokasi. *Jurnal Belaindika: Pembelajaran dan Inovasi Pendidikan*, 1(1), 34-45.
- Alawi, D., Sumpena, A., Supiana, S., & Zaqiah, Q. Y. (2022). Implementasi kurikulum merdeka belajar kampus merdeka pasca pandemi COVID-19. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(4), 5863-5873.
- Amalia, F. R., & Najicha, F. U. (2022). Peran pendidikan kewarganegaraan dalam mengatasi luntarnya nilai nasionalisme dan cinta NKRI di era globalisasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 428-435.
- Anand, K., & Lall, M. (2022). The debate between secularism and Hindu nationalism-how India's textbooks have become the government's medium for political communication. *India Review*, 21(1), 77-107.
- Arayunedy, S., & Armandha, S. T. (2020). Terorisme nasionalistis a la Balkanisasi. *Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat*, 7(1), 99-112.
- As, B. (2016). Persepsi tentang Nasionalisme (studi pada mahasiswa PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin). *Tarbiyah Islamiyah*, 6, 17-29.
- Aswasulasikin, A., Pujiani, S., & Alfian Hadi, Y. (2020). Penanaman nilai nasionalis melalui pembelajaran budaya lokal sasak di sekolah dasar. *Jurnal Didika: Wahana Ilmiah Pendidikan Dasar*, 6(1), 63-76.
- Baltz, M. J. (2021). 'Americanism not globalism will be our credo!': An analysis of the economic nationalism (s) of Trump's administration and an agenda for further research. *Nations and Nationalism*, 27(3), 797-815.
- Barlian, U. C., Solekah, S., & Rahayu, P. (2022). Implementasi kurikulum merdeka dalam meningkatkan mutu pendidikan. *Joel: Journal of Educational and Language Research*, 1(12), 2105-2118.
- Baughn, C. C., Yaprak, A. (1996). Economical nationalism: Conceptual and empirical development. *Political Psychology*, 17(4), 759-778.
- Botterill, K., Hopkins, P., Sanghera, G., & Arshad, R. (2016). Securing disunion: Young people's nationalism, identities and (in) securities in the campaign for an independent Scotland. *Political Geography*, 55, 124-134.
- Browning, C. S., & de Oliveira, A. F. (2017). Introduction: Nation branding and competitive identity in world politics. *Geopolitics*, 22(3), 481-501.
- Budiman, A. (2020). Aktualisasi nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi) dalam perspektif Islam. *Jurnal Socius*, 9(1), 87-93.
- Deng, Z. (2018). Contemporary curriculum theorizing: Crisis and resolution. *Journal of Curriculum Studies*, 50(6), 691-710.
- Dexter, H. (2012). Terrorism and violence: Another violence is possible?. *Critical Studies on Terrorism*, 5(1), 121-137.
- Doel, M. (1987). The practice curriculum. *Social Work Education*, 6(3), 6-12.
- Engel, R. C. (1968). Curriculum practice or research: Which is ahead?. *Childhood Education*, 44(9), 531-540.

- Greenfeld, L., & Chirot, D. (1994). Nationalism and aggression. *Theory and Society*, 23(1), 79-130.
- Grigoryan, L. K., & Ponizovskiy, V. (2018). The three facets of national identity: Identity dynamics and attitudes toward immigrants in Russia. *International Journal of Comparative Sociology*, 59(5-6), 403-427.
- Handayani, S. A. (2019). Nasionalisme dalam perubahan di Indonesia. *Historia*, 1(2), 154-170.
- Hanifah, H., & Yudianto, I. (2019). The influence of religiosity, nationalism, and tax corruption perception on tax compliance: Study of the Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) taxpayers in Bandung city. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 2(1), 24-34.
- Hinnebusch, R. (2020). Identity and state formation in multi-sectarian societies: Between nationalism and sectarianism in Syria. *Nations and Nationalism*, 26(1), 138-154.
- Hollyer, J. R., & Wantchekon, L. (2012). Corruption in autocracies. *SSRN Electronic Journal*, 1-49.
- Irfani, A. (2016). Nasionalisme bangsa dan melunturnya semangat bela negara. *Al-Hikmah*, 10(2), 135-145.
- Isaacs, R., & Polese, A. (2015). Between "imagined" and "real" nation-building: Identities and nationhood in post-Soviet Central Asia. *Nationalities Papers*, 43(3), 371-382.
- Ismawati, E. (2018). Nationalism in Indonesian literature as active learning material. *International Journal of Active Learning*, 3(1), 33-48.
- Iswara, Y. T., & Ginting, A. H. (2022). Meningkatkan semangat nasionalisme melalui pendidikan Pancasila pada masa pandemi COVID-19. *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment*, 2(1), 11-23.
- Kholidah, N. R. J. (2019). Eksistensi budaya lokal sebagai penguat nasionalisme. *Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 168-174.
- Kim, S., & Jung, D. J. (2019). Ideology, nationalism, and education: The case of education reforms in the two Koreas. *Asia Pacific Education Review*, 20(2), 295-304.
- Kuncoro, J. (2007). Prasangka dan diskriminasi. *Proyeksi*, 2(2), 1-16.
- Kusumawardani, A., & Faturochman. (2004). Nasionalisme. *Buletin Psikologi*, 7(2), 61-72.
- Lestari, E. Y. (2018). Menumbuhkan kesadaran nasionalisme generasi muda di era globalisasi melalui penerapan nilai-nilai Pancasila. *Adil Indonesia Jurnal*, 1(1), 20-27.
- Levi-Faur, D. (1997). Economic nationalism: From Friedrich List to Robert Reich. *Review of International Studies*, 23(3), 359-370.
- Linné, A. (2015). Curriculum theory and didactics-towards a theoretical rethinking. *Nordic Journal of Studies in Educational Policy*, 2015(1), 31-39.
- López Romo, R., & Fernández Soldevilla, G. (2018). From ethnic exclusion to terrorism? The case of radical Basque nationalism. *Journal of Iberian and Latin American Studies*, 24(3), 443-459.
- Luthfillah, N., & Rachman, B. (2022). Pentingnya penanaman nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme pada anak usia dini. *Journal of Education Research*, 3(1), 35-41.
- Melograno, V. (1978). Status of curriculum practice: Are you a Consumer or designer? *Journal of Physical Education and Recreation*, 49(3), 27-28.
- Metress, E. (1982). Library research in health education. *Health Education*, 13(3), 19-23.

- Moberg, E. (2018). Exploring the relational efforts making up a curriculum concept: An actor-network theory analysis of the curriculum concept of children's interests. *Journal of Curriculum Studies*, 50(1), 113-125.
- Nasution, T. (2019). Pancasila dalam konteks pendidikan nilai. *Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, 2(1), 66-78.
- Nursamsi, D. J., & Jumardi, J. (2022). Peran guru dalam menanamkan sikap nasionalisme terhadap peserta didik sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(5), 8341-8348.
- Pawłusz, E., & Polese, A. (2017). "Scandinavia's best-kept secret."† Tourism promotion, nation-branding, and identity construction in Estonia (with a free guided tour of Tallinn Airport). *Nationalities Papers*, 45(5), 873-892.
- Purwanto, A. (2020). COVID-19 pandemic and home online learning system: Does it affect the quality of pharmacy school learning?. *Systematic Review Pharmacy*, 11(8), 524-530.
- Rao, S. (1999). Woman-as-symbol. *Women's Studies International Forum*, 22(3), 317-328.
- Riyanta, S. (2022). Shortcut to terrorism: Self-radicalization and lone-wolf terror acts (a case study of Indonesia). *Journal of Terrorism Studies*, 4(1), 1-20.
- Saliman, A. R., & Agustian, R. A. (2017). Menguatkan nasionalisme baru generasi muda yang berkarakter (upaya mengembangkan model pencegahan radikalisme dan terorisme di kampus). *Law Research Review Quarterly*, 3(2), 129-134.
- Santosa, P. B. (2012). Korupsi bangkrutkan nasionalisme. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 59-64.
- Schneider, B. (2019). Methodological nationalism in Linguistics. *Language Sciences*, 76, 1-13.
- Sianturi, Y. R. U., & Dewi, D. A. (2021). Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai pendidikan karakter. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 222-231.
- Soetjipto, A. W., & Yunazwardi, M. I. (2021). Papuan nationalism within the framework of Indonesian nationalism. *Jurnal Global dan Strategis*, 15(1), 25-50.
- Sulistiyono, S. T. (2018). Nasionalisme, negara-bangsa, dan integrasi nasional Indonesia: Masih perlukah?. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 3(1), 3-12.
- Surajaya, I. K. (2018). Is nationalism still alive? Learn from Indonesia and Japan junior high school history textbook. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 7(3), 1651-1657.
- Suryana, F. I., & Dewi, D. A. (2021). Lunturnya rasa nasionalisme pada anak milenial akibat arus modernisasi. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(2), 598-602.
- Syahira Azima, N., Furnamasari, Y. F., & Dewi, D. A. (2021). Pengaruh masuknya budaya asing terhadap nasionalisme bangsa Indonesia di era globalisasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7491-7496.
- Syarif, F. (2019). Integrasi nilai kearifan lokal terhadap penanaman nasionalisme bagi siswa sekolah dasar. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, 2(2), 187-195.
- Varga, M. (2021). The return of economic nationalism to East Central Europe: Right-wing intellectual milieus and anti-liberal resentment. *Nations and Nationalism*, 27(1), 206-222.
- Vhalery, R., Setyastanto, A. M., & Leksono, A. W. (2022). Kurikulum merdeka belajar kampus merdeka: Sebuah kajian literatur. *Research and Development Journal of Education*, 8(1), 185-201.

- Walton, G. W. (2021). Can civic nationalism reduce corruption? Transnational and translocal insights from Solomon Islands. *Political Geography*, 89(May), 1-10.
- Wang, C. (2017). The dark side of the war: Corruption in the Guomintang government during World War II. *Journal of Modern Chinese History*, 11(2), 249-263.
- Wang, X., & Wang, T. (2018). Discourse on nationalism in China's traditional cultural education: Teachers' perspectives. *Educational Philosophy and Theory*, 50(12), 1089-1100.
- Widiastuti, N. E. (2022). Luntarnya sikap nasionalisme generasi milenial terhadap Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 3(2), 80-86.
- Widiyono, S. (2019). Pengembangan nasionalisme generasi muda di era globalisasi. *Jurnal Populika*, 7(1), 5-10.
- Winanti, P. S., & Diprose, R. (2020). Reordering the extractive political settlement: Resource nationalism, domestic ownership, and transnational bargains in Indonesia. *Extractive Industries and Society*, 7(4), 1534-1546.
- Xiaolin, D. (2017). Unanswered questions: Why we may be wrong about Chinese nationalism and its foreign policy implications. *Journal of Contemporary China*, 26(108), 886-900.
- Ylimaki, R. M., & Uljens, M. (2017). Theorizing educational leadership studies, curriculum, and didaktik: Nonaffirmative education theory in bridging disparate fields. *Leadership and Policy in Schools*, 16(2), 175-227.
- Zhao, S. (1998). A state-led nationalism: The patriotic education campaign in post-tiananmen China. *Communist and Post-Communist Studies*, 31(3), 287-302.